



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 16 Agustus 2013

Halaman: 2

Pencegahan Korupsi Prioritas Pemkot

Walikota: Godaannya Banyak

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menempatkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan daerah. Pemkot juga berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Hal itu disampaikan Walikota Haryadi Suyuti dalam acara Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemkot Jogja dengan Perwakilan BPKP DIY, Rabu (31/7) lalu, di balai kota.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Candro Imantoro beserta jajaran. Sedangkan dari Pemkot Jogja hadir jajaran SKPD.

"Sekarang pemerintahan yang baik dan bersih menjadi tren. Aparatnya juga harus baik. Kami mohon agar selalu diingatkan karena godaannya banyak," kata Haryadi.

Menurut dia, menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Bagi Pemkot Jogja komitmen menuju terwujudnya good governance ditunjukkan melalui kualitas pelayanan yang baik dan memajukan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah yang tinggi.

"Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik tidak bisa kita berjalan sendiri sehingga sinergi menjadi hal yang baik untuk terus dilakukan," katanya.

Penandatanganan berita acara kesepakatan tindak lanjut verifikasi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Perwakilan BPKP DIY dengan Pemkot ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus menunjukkan komitmen Pemkot Jogja memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP DIY Candro Imantoro menambahkan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari pengamatan atas pelayanan publik di Kota Jogja, antara lain di Dinas Perizinan dan RS Jogja.



KESEPAKATAN BERSAMA -- Walikota Haryadi Suyuti memandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan Perwakilan BPKP DIY, Rabu (31/7) lalu.

BPKP mendorong instansi publik untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pencegahan korupsi. Sasarannya untuk mencari aksi dan sebagai tindak lanjut dalam rangka upaya pencegahan dan penekanan sistem pengendalian intern.

"Kami yakin Pemerintah Kota Jogja sudah baik bahkan cukup bagus dalam upaya mengantisipasi risiko yang ada," ujarnya. (*)

Tindak Lanjut

< Ditanggapi

< Diketahui

ya Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005